

KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH (SAKD), PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA SATUAN KINEJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KOTA DEPOK)

MUHAMMAD RIFKY ALAMSYAH, SRI RAHAYU, MUHAMAD MUSLIH
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Telkom

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. LKPD yang berkualitas membantu memenuhi kewajiban pemerintah terbuka secara publik, serta membantu memenuhi kebutuhan pengguna dari LKPD dalam mengambil keputusan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah baik pengaruh secara parsial maupun secara simultan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan bersifat kausalitas. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi/ keuangan pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok. Teknik penentuan sampel menggunakan metode sampling sensus, dimana semua populasi dijadikan sample yakni sebanyak 89 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis serta didahului dengan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan pengujian kontribusi secara simultan oleh variabel-variabel bebas (R^2) sebesar 91,2%.

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang baik yaitu disarankan instansi meningkatkan kompetensi sumber daya manusianya, menerapkan/ mengimplementasikan SAKD yang berlaku, memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tugas, serta menerapkan sistem pengendalian internal yang baik dalam menciptakan suasana kerja yang baik, agar tugas yang dilaksanakan/ penyajian laporan keuangan akan semakin baik/berkualitas.

Keywords : *Sumber Daya Manusia; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Teknologi Informasi; Sistem Pengendalian Internal; Laporan Keuangan Daerah*

PENDAHULUAN

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas membantu memenuhi kewajiban pemerintah terbuka secara publik, selain dapat membantu memenuhi kebutuhan pengguna dari LKPD tersebut terutama dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan yang merupakan bagian dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Peraturan Pemerintah (PP) No.71 tahun 2010, dijelaskan tujuan dari pelaporan keuangan pemerintah sebagai berikut :

1. Menyediakan sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.

LKPD yang berkualitas adalah LKPD yang dapat memenuhi tujuan-tujuan yang telah disebutkan diatas, selain itu LKPD yang berkualitas juga dapat menunjukkan bahwa SKPD tersebut telah melaksanakan fungsi eksekutif organisasi dengan baik. Selain itu,

dalam mewujudkan LKPD yang berkualitas LKPD yang diterbitkan atau disusun oleh SKPD harus memenuhi karakteristik-karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam PP No.1 tahun 2010, karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar LKPD dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, karakteristik-karakteristik tersebut ialah relevan, andal ,dapat dibandingkan ,dan dapat dipahami.

Berikut adalah faktor yang diindikasikan dapat mempengaruhi dari kualitas LKPD diantaranya yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal. Selanjutnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara parsial dan simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan menggunakan alat bantu kuesioner. Populasi penelitian sebanyak 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas, Badan, dan Kantor di Kota Depok dengan jumlah sampel 89 responden yang terdiri dari kepala sub bagian keuangan beserta seluruh staf/pegawainya. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *Census Sampling*. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi, penerapan sistem pengendalian internal, dan kualitas LKPD di SKPD Kota Depok
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok?
 - a. Untuk mengetahui pengaruh kompe-

- tensi sumber daya manusia terhadap LKPD di SKPD Kota Depok
- b. Untuk mengetahui pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.
 - c. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.
 - d. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kompetensi sumber daya manusia, penerapan SAKD, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal, terhadap kualitas LKPD di SKPD Kota Depok.

DASAR TEORI DAN METODOLOGI

1. Dasar Teori

Menurut Winidiyaningrum (2010), Kinerja sumber daya manusia kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitasnya harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (output) dan hasil-hasil (outcomes)

Menurut penelitian, Karmila,dkk (2014), Yeny (2016),dan Winidiyaninrum (2010) menyatakan bahwa untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari : level of responsibility dan Kompetensi SDM.

Akuntansi keuangan daerah adalah aktivitas jasa yang terdiri dari pencatatan, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas PEMDA (kabupaten,kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang dibu-

tuhkan oleh pihak-pihak eksternal PEMDA. Pihak-pihak eksternal terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), BPK, investor, kreditor dan donatur, analisis ekonomi dan pemerhati pemda, rakyat, pemda lain dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada dalam lingkungan akuntansi keuangan daerah.(Sujarweni, 2015:158).

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) baik pemerintah pusat maupun PEMDA, sudah harus menggunakan basis akrual. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam, penelitian terdahulu Ihsanti (2014), dan Herawati (2014) mengukur penerapan SAKD dengan indikator PP No.71 Tahun 2010 dengan melihat apakah PP tersebut apakah sudah diterapkan dalam instansi atau tidak. Dengan demikian maka, penerapan SAKD dapat disimpulkan, dan dilihat dari :

1. Penerapan sistem akuntansi sudah mengacu pada PP No.71 Tahun 2010
2. Proses akuntansi di SKPD sesuai dengan prosedur akuntansi keuangan daerah. (Sujarweni, 2015: 158-160)

Teknologi informasi adalah teknologi yang fungsinya digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan menyusun, menyimpan untuk menghasilkan informasi yang berkualitas di mana kualitas tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, bisnis, dan pemerintahan (Sutabri ,2014:3).

Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi,

juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. (Haza:2015). Sehingga, teknologi informasi dapat membantu para penyusun laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang baik serta mengumpulkan dokumen-dokumen untuk membuat laporan keuangan tersebut. Menurut Sutabri (2014:4), terdapat tiga komponen utama teknologi informasi, yaitu: Perangkat Keras (Hardware), Perangkat Lunak (Software), dan Orang (Brainware).

Pengendalian internal adalah suatu proses, dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen dan personel lain, yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai untuk mencapai tujuan dalam kategori yang diantaranya : Efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan dalam pelaporan keuangan, dan kepatuhan dengan hukum yang berlaku dan peraturan (Karmila,dkk : 2014).

PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mendefinisikan pengendalian intern sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.

Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diadaptasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 termasuk:

1. Lingkungan pengendalian, pimpinan lembaga pemerintah dan semua karyawan harus membuat serta memelihara lingkungan organisasi untuk memimpin keseluruhan organisasi demi perilaku positif dan dukungan untuk kontrol internal, serta manajemen yang baik.

2. Penilaian Risiko, pengendalian internal yaitu harus memberikan penilaian risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar dan dari dalam, terdiri dari kegiatan berikut:
 - a. Identifikasi risiko
 - b. Analisis risiko
 - c. Kegiatan pengendalian, yang membantu memastikan bahwa kegiatan yang dipimpin dan dilaksanakan instansi pemerintah telah diimplementasikan, kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain (Ihsanti,2014). Selanjutnya, menurut PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Dalam Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006, Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara dan Daerah selama suatu periode.

Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan

pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periodeperiode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. (Haza, 2015).

2. Metodologi

Populasi dalam penelitian ini adalah 22 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berupa Dinas dan Badan di Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner.

Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah census sampling dengan total sampel 89 responden yang terdiri atas kepala sub bagian keuangan berupa seluruh staf atau pegawainya. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda.

PEMBAHASAN

Sebelum melakukan analisis statistik deskriptif, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas atas seluruh pernyataan yang ada di dalam kuesioner untuk mengetahui apakah pernyataan yang digunakan telah valid dan reliabel untuk diuji. Setelah itu, barulah dilakukan analisis statistik deskriptif yang hasilnya terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Statistik deskriptif

Rata-rata					
Variabel	SS	S	R	TS	STS
Kompetensi SDM	15	48	13	12	2
Penerapan SAKD	14	59	10	5	1
Pemanfaatan TI	11	44	22	10	2
Sistem Pengembalian Internal	12	63	11	3	0
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	16	63	8	1	0

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa variabel Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan TI, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas LKPD rata-rata mayoritas responden memilih setuju, artinya setiap pernyataan yang ada dalam kuesioner sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Hal ini mengindikasikan bahwa Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan TI,

Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas LKPD yang sebenarnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Depok telah berada dalam kategori tinggi atau baik.

Berdasarkan uji asumsi klasik yakni normalitas kelima variabel tersebut telah berdistribusi normal yakni sebesar 0,067 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05, berdasarkan uji multikolonieritas

menunjukkan kelima variabel tersebut memiliki nilai tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 artinya tidak terjadi multikolonieritas antar variabel, berdasarkan uji heteroskedostisitas pola yang dihasilkan

menyebar baik di bawah angka 0 maupun sumbu Y ini menunjukkan tidak terjadinya heteroskedostisitas. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linear berganda seperti tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi	
	B	Std Error
Konstansta	-,566	,136
Kompetensi SDM	,235	,76
Penerapan SAKD	,376	0,000
Pemanfaatan TI	,322	0,011
Sistem Pengendalian Internal	,244	0,072

1. Kompetensi SDM, Penerapan SAKD, Pemanfaatan TI, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.26 diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti secara simultan variabel kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan kualitas laporan keuangan daerah yang artinya semakin tinggi kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem pengendalian internal maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik.

Hasil penelitian ini ditunjang juga dengan penjelasan dari hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait variabel kompetensi SDM dimana skor rata-rata persentase variabel kompetensi SDM sebesar 73,8%, dapat diartikan bahwa kompetensi pegawai keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah

Kota Depok sudah berada pada kategori yang tinggi atau SDM dalam bagian keuangan Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok sudah memahami tanggung jawab serta memiliki kompetensi yang memadai untuk menyusun laporan keuangan serta menyelesaikan tugas.

Selanjutnya, untuk skor rata-rata mengenai tanggapan responden tentang penerapan SAKD sebesar 78,4%, yang dapat diartikan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok sudah berada pada kategori yang tinggi atau Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) yang berlaku di Pemerintah Daerah di Indonesia sudah sepenuhnya terimplementasi dalam membantu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok. Untuk skor rata-rata mengenai tanggapan responden tentang pemanfaatan TI 71,5%, yang berarti teknologi informasi yang digunakan pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok berada dalam kategori yang tinggi atau teknologi informasi sudah sepenuhnya

dimanfaatkan dengan baik oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok dalam menunjang untuk menyajikan laporan keuangan, serta menyelesaikan tugas. Untuk skor rata-rata mengenai tanggapan responden tentang sistem pengendalian internal sebesar 78,9% dan termasuk dalam kategori tinggi, yang berarti sistem pengendalian internal pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok sudah terimplementasi dengan baik guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat, dalam rangka menyusun laporan keuangan, serta menyelesaikan tugas. Sedangkan skor rata-rata persentase mengenai tanggapan responden tentang kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok sebesar 81,2%, yang berarti tingkat laporan keuangan yang disajikan pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok sudah disajikan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kompetensi SDM, penerapan SAKD, pemanfaatan TI, dan sistem sengendalian internal berpengaruh sebesar 91,2% terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andini dkk (2015) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa adanya pengaruh dari Kompetensi SDM dan Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Lalu, Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haza (2015) yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. Selanjutnya, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zahara dkk (2015) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji t diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,03 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti secara parsial variabel kompetensi SDM berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, artinya semakin tinggi tingkat kompetensi SDM, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan semakin baik.

Pengaruh kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan daerah didukung dengan penjelasan dari hasil pengujian statistik deskriptif mengenai tanggapan responden terkait kompetensi SDM sebesar 73,8% yang berarti Kompetensi SDM pegawai bagian keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Depok sudah tinggi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andini dkk (2015), Yusrawati dkk (2015), dan Hertati (2015) yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

3. Penerapan SAKD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji t diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,000072 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti secara parsial variabel penerapan SAKD berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, artinya semakin tinggi tingkat Penerapan SAKD, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan semakin baik.

Pengaruh penerapan SAKD terhadap kualitas laporan keuangan daerah didukung dengan analisis deskriptif tanggapan responden yang mendapat skor rata-rata dengan katerogi tinggi sebesar 78,4%. Hal tersebut ditunjang dengan tingginya tanggapan responden terhadap indikator penerapan sistem akuntansi keuangan sudah mengacu pada PP No. 71 Tahun 2010 pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok sebesar 75,7%, yang dapat diartikan bahwa Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok setuju, serta sudah menerapkan PP No.71 Tahun 2010 yang sudah berlaku untuk Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menyusun laporan keuangannya, yang hal tersebut dapat membantu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Andini dkk (2015), dan Herawati dkk (2014), yang menyatakan bahwa Penerapan SAKD berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4. Pemanfaatan TI terhadap Kualitas LKPD

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji t diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti secara parsial variabel pemanfaatan TI berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, artinya semakin tinggi Teknologi Informasi dimanfaatkan, maka kualitas laporan keuangan daerah akan semakin baik.

Pengaruh pemanfaatan TI terhadap kualitas laporan keuangan daerah didukung dengan analisis deskriptif tanggapan responden yang mendapat skor rata-rata dengan katerogi tinggi sebesar 71,5%. Hal tersebut didukung dengan tingginya tanggapan responden terhadap indikator perangkat keras (*hardware*) yang dibuktikan dengan jawaban responden sebesar 73,2%, maka dapat disimpulkan bahwa Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok setuju, serta sudah memanfaatkan, memelihara

perangkat keras (*Hardware*), serta perangkat keras (*Hardware*) yang tersedia sudah sesuai dengan spesifikasi dalam menyusun laporan keuangan/ menyelesaikan tugas-pimpinan. Pegawai bagian keuangan juga tetap akan menjalankan tugas-tugasnya, baik ada campur tangan yang besar oleh pimpinan maupun tidak ada. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Haza (2015), Hertati (2015), dan Karmila (2014), yang menyatakan bahwa Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

5. Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas LKPD

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.27 Uji t diperoleh nilai signifikansi yaitu $0,010 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak yang berarti secara parsial variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan dengan arah yang positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, artinya apabila sistem pengendalian internal dalam instansi diterapkan dengan baik, maka Kualitas Laporan Keuangan Daerah akan semakin baik.

Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah didukung dengan analisis deskriptif tanggapan responden yang mendapat skor rata-rata dengan katerogi tinggi sebesar 78,9%. Hal ini didukung dengan tingginya tanggapan responden terhadap indikator lingkungan pengendalian sebesar 80,3%, yang dapat diartikan bahwa Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Depok menerapkan, serta setuju bahwa lingkungan pengendalian internal yang terdapat dalam instansi dengan mempunyai struktur, peraturan, dan kegiatan evaluasi yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dengan tujuan mendukung kinerja dari masing-masing pegawai dalam menyusun laporan keuangan/

menyelesaikan tugas. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zahara (2015), dan Indriasih dkk (2014). yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Daerah rata-rata mayoritas responden memilih setuju, Hal ini mengindikasikan bahwa keempat variabel tersebut berada dalam kategori tinggi atau baik.

Berdasarkan hasil uji simultan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah, selanjutnya secara parsial Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan SAKD, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, dan Yusrawati. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi I* Vol. 24 No. 1 Juni 2015.
- Emilda, Ihsanti. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negri Padang* (2014) : 1-20
- Haza, Irfan Ikhwanul. (2015). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Pemerintah Kota Padang.
- Hertati Lesi. (2015). *Competence of Human Resources, The Benefits of Information Technology on Value of Financial Reporting in Indonesia*. *Literatur : Research Journal of Finance and Accounting* ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.8, (2015) : 1-8.
- Indriasih Dewi, dan Koeswayo Poppy Sofia. (2014). *The Effect of Government Apparatus Competence and The Effectiveness of Government Internal Control Toward The Quality of Financial Reporting and its Impact on The Performance Accountability in Local Government (Survey Of All Units Local Government In Tegal City - Central Java Province- Indonesian)*. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol. 5, Issue 1 (Dec.) ISSN 2289-1560 (2014) : 1-11.
- Karmila, Tanjung, dan Faris. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau). *Jurnal SOROT* Vol 9 No 1 (2014) : 25-42, ISSN 1907 – 364X.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010* . <http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/>

PP71.pdf. (online). (23 Januari 2017).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008*. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/pp60Tahun2008_SPIP.pdf. (online). (23 Januari 2017).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005*. <http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/60/873.bpk>. (online). (23 Januari 2017).

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006*. (online). <http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/pp%208%20tahun%202006.pdf>. (23 Januari 2017).

Silviana, dan Zahara G. (2015). *The Influence of Competence Local Government Agencies and The Implementation Government of Internal Control System toward the Quality of Local Government Financial Statement*. Journal of Finance and Accounting

ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) Vol.6, No.11, (2015) : 1-12.

Sujarweni, V. Wiratna (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Sutabri, Tatang. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI

Winidiyaningrum Celviana, dan Rahmawati. (2010). Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Penendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). Simposium Nasional Akuntansi XIII Puwokerto 2010.

Yeny. Karamoy., dan Poputra T Agus. (2016). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. ISSN 2303